

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Pada penelitian ini menggunakan penyebaran kuesioner 115 sampel, dan dikembalikan 108 sampel. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,425, yang lebih besar dari nilai signifikansi. Nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hal ini, menandakan bahwa semakin baik atau tidak baiknya Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,001, yang lebih kecil dari nilai signifikansi. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Pengaruh

signifikan ini mempunyai arah yang positif, dapat dilihat dari koefisiennya yaitu sebesar 0,234. Hal ini, menandakan bahwa Sistem Pengendalian Intern pada Kabupaten Bantul mencapai tujuan bersama dan menyediakan informasi keuangan yang menaati aturan dan handal, maka akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Variabel Akuntabilitas memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,000, yang lebih kecil dari nilai signifikansi. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Akuntabilitas (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga variabel Akuntabilitas (X3) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Pengaruh signifikan ini mempunyai arah yang positif, dapat dilihat dari koefisiennya yaitu sebesar 0,620. Hal ini, menandakan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh yang baik untuk tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Variabel Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan memiliki nilai signifikansi (sig) sebesar 0,049, yang lebih kecil dari nilai signifikansi. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitas yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan (X4) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Sehingga variabel Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan (X4) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Pengaruh signifikan ini mempunyai arah yang

positif, dapat dilihat dari koefisiennya yaitu sebesar 0,210. Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan berpengaruh dalam membuat kualitas laporan keuangan daerah menjadi semakin baik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan satu variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah jika kompetensi menurun atau meningkat tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga penelitian ini telah mencapai tujuannya untuk menjelaskan dan menguji kembali variabel-variabel terdahulu dengan subjek penelitian yang baru dan dengan mengeneralisasikan dengan penelitian lama.

Penelitian ini membuktikan bahwa dengan menggabungkan empat variabel independen yang diteliti dari penelitian terdahulu yaitu Wardani (2017), Ningrum (2018), Hamsinar (2017), Septiningtyas (2017) dan Lubis (2018), terbukti bahwa hasilnya konsisten. Namun pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia oleh Wardani (2017) dan Lubis (2018) hasilnya tidak konsisten, karena pada hasil yang diteliti oleh penulis, variabel kompetensi sumber daya tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Pada penelitian ini juga membuktikan bahwa dengan berpengaruhnya sistem pengendalian intern, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah dapat mempengaruhi pengelolaan izin dan pajak reklame yang belum tertib dan pengelolaan piutang daerah yang belum memadai. Walaupun kedua masalah tersebut tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Jika dikaitkan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sistem pengendalian internal merupakan suatu entitas dalam pemerintahan yang memiliki tujuan untuk tercapainya suatu kegiatan yang efektif dan efisien, akuntabilitas merupakan suatu rasa tanggungjawab akan pelaporan laporan keuangan yang disajikan, dan transparansi pengelolaan laporan keuangan merupakan prinsip keterbukaan dengan masyarakat mengenai informasi keuangan daerah.

Dari ketiga penjelasan variabel tersebut, yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan izin dan pajak reklame dan pengelolaan piutang daerah yang belum memadai yaitu sistem pengendalian intern dan akuntabilitas, karena dengan tingginya tingkat kesadaran dari aparatur pemerintah daerah dalam memberlakukan Perda Bantul No.10/2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi yang merupakan kebijakan publik yang mengatur mengenai penyelenggaraan reklame dan media informasi yang memiliki tujuan untuk penertiban, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dan media informasi agar memenuhi aspek etika dan estetika terhadap beberapa pemilik usaha reklame. Selain itu, dengan adanya rasa tanggung jawab dari aparatur pemerintah dalam mengelola pajak reklame dan piutang daerah dapat membantu terkelolanya pajak reklame dan piutang daerah. Sehingga dengan diberlakukannya Perda Bantul No.10/2020 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi

dapat menjadi solusi untuk tertibnya pengumpulan pajak dan izin pemasangan reklame. Selain itu, diharapkan piutang yang belum dikelola dengan baik, dapat dikelola dengan baik.

5.2. Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan koreksi untuk pemerintah daerah dalam meningkatkan, menjaga dan memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor seperti Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak dapat menjangkau 36 OPD Kabupaten Bantul dikarenakan keterbatasan waktu yang dialami peneliti dalam melakukan penyebaran kuesioner. Selain itu, peneliti mengalami kesulitan dalam mengambil informasi dari responden. Dikarenakan hal tersebut, penulis hanya dapat menyebarkan kuesioner ke 29 OPD Kabupaten Bantul.

Keterbatasan lain dalam penelitian ini adalah adanya responden yang mengisi kuesioner tidak sesuai dengan kriteria sampel dan terdapat jawaban pertanyaan yang tidak benar atau mengisi asal-asalan. Hal ini, menyebabkan data yang didapatkan peneliti tidak memenuhi normalitas dan terheteroskedastisitas. Karena hal tersebut, peneliti melakukan proses outlier. Proses outlier digunakan untuk mengidentifikasi kuesioner-kuesioner yang outlier dan untuk menyaring data outlier. Sehingga data yang digunakan peneliti adalah data setelah melalui proses

Gambar 4.13. Data Tabulasi Outlier

	NO DATA OUTLIER 2	NO DATA OUTLIER 1	NO DATA ASLI	NAMA	L/P	UMUR	GRADE	WORK TIME	JABATAN	OPD
OUTLIER 1	1	22	LENI YULIANI	P	46	S2	16 THN	SUBKOOR PENGADUAN & PELAYANAN INFORMASI	DPMPPTSP	
	1	23	DWI MULYANI	P	-	S1	-	SUBKOOR KEUANGAN	DPMPPTSP	
	1	26	IHWAN	L	47	S2	20 THN	KOSIB PISP1	DPMPPTSP	
	1	33	NN	P	-	S1	-	-	DINAS DIKFORA	
	1	39	NN	-	-	-	-	-	DISKOMINFO	
	1	49	DKTIK	P	31	S1	7 THN	STAF	DISDUKCAPIL	
	1	54	MOHAMMAD YENNY	L	38	S2	12 THN	KASUBAG PROGRAM & KEUANGAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	1	56	SUPRAYITNA	L	34	S1	12 THN	ANALIS	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	1	67	MAMNUN	P	21	D3	3 THN	STAFF	DISHUB	
	1	79	SEPTI	P	39	S1	16 THN	JKASUBAG KEU& PROGRAM	DP3APPKB	
	1	81	NN	P	35	S1	12 THN	STAFF	DP3APPKB	
	1	85	NN	-	-	-	-	-	DINAS KEBUDAYAAN	
	1	87	NN	L	28	S1	4 THN	STAF	DINAS KEBUDAYAAN	
	1	89	VETI	P	32	D3	5 THN	-	DINAS SOSIAL	
	1	91	SONIA	P	25	D3	1,5 THN	VERIFIKATOR KEUANGAN	DINAS SOSIAL	
	1	108	NN	L	35	D3	3 THN	STAF	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
	OUTLIER 2	2	9	NN	L	31	S1	3 THN	STAFF	BPKAD
		2	33	NN	-	53	SMA	-	-	DISKOMINFO
2		35	40	NN	51	S1	30 THN	SUBKOOR	DISKOMINFO	
2		42	47	ANI	P	52	S2	-	KASUBAG PROGRAM	
2		43	48	DITA	P	25	SMA	5 THN	STAFF	
2		54	62	NAMA	L	44	S2	22 THN	KASUBAG KEUANGAN DAN ASET	DINKES

Pada Gambar 4.13. Data Tabulasi Outlier, diketahui bahwa data-data yang outlier berasal dari kuesioner yang di isi oleh responden yang tidak berhubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Karena pada data diatas terdapat 12 OPD yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah/Dinas yang tidak berhubungan langsung dengan akuntansi dan laporan keuangan, sehingga besar kemungkinan responden dalam menjawab kuesioner tidak memahami isi kuesioner peneliti atau tidak membaca isi kriteria kuesioner peneliti dengan seksama.

5.4. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama, namun berbeda subjek penelitian. Sebaiknya, melakukan penelitian dengan menjelaskan kriteria secara detail dan memperluas cakupan sampel dari populasi yang lebih besar. Dengan harapan, hasil yang diperoleh lebih akurat dan mendapatkan banyak sampel untuk mencapai standar pengolahan data. Selain itu, jika dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan OPD / Dinas yang berhubungan langsung dengan akuntansi dan laporan keuangan. Lalu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti beberapa variabel yang akan di uji, agar mengetahui pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. (2017, 09 05). *Dimensi Akuntabilitas*. Retrieved from Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah: bpkad.banjarkab.go.id
- BPK RI. (2022, April 21). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Retrieved from yogyakarta.bpk.go.id: <https://yogyakarta.bpk.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-gunungkidul-dan-kabupaten-bantul-tahun-anggaran-2021-mendapat-opini-wajar-tanpa-pengecualian/>.
- BPK RI. (2022, April 21). *Gunungkidul dan Bantul Pertahankan Opini WTP Kesekian kalinya*. Retrieved from yogyakarta.bpk.go.id: <https://yogyakarta.bpk.go.id/gunungkidul-dan-bantul-pertahankan-opini-wtp-kesekian-kalinya/>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamsinar. (2017). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Kabupaten Pinrang)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta, Indonesia: BPFY Yogyakarta.
- Hery. (2014). *Praktis Menyusun Laporan Keuangan*. Jakarta, Indonesia: PT Grasindo.

- Hutapea, P., dan Thoha, N. (2008) *Kompetensi Plus*. Jakarta, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Lubis, A. (2018). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Edisi 1). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2005). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Yogyakarta: Andi.
- _____. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi* (Edisi Ketiga). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Ningrum, K. K. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Kerja Pengawasan Intern BPKP.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata dan Praktik Kerja Lapangan.

Pemerintah Kabupaten Bantul (2022). *Profil Perangkat Daerah Kabupaten Bantul*. Retrieved from [bantulkab.go.id: https://bantulkab.go.id/perangkat_daerah.html](https://bantulkab.go.id/perangkat_daerah.html).

Priyono, dan Marnis. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sidoarjo, Indonesia: Zifatama.

Putra, C. M. (2020). *Transparansi Pengadaan Barang/Jasa dikantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kota Makassar*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar.

Rankin, M., Ferlauto, K., McGowan, S., and Stanton, P. (2017). *Contemporary Issues in Accounting* (2nd edition). Australia: John Wiley and Sons.

Sekaran, U., dan Bougie, R. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (7th Edition). New Jersey: Wiley.

Septiningtyas, T. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.

Standar Profesional Akuntan Publik SA Seksi 700 tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan.

Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Wardani, D. Y. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Medan.